



PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Weni Herlianti¹, Nensi Yuniarti. Zs², Furqonti Ranidiah³, Dinal Eka Pertiwi⁴

Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3,4}

herliantiweni3@gmail.com, nensiyuniarti@umb.ac.id, furqontiranidiah@umb.ac.id,
dinalekapertiwi@umb.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima : 01/06/2026
Direvisi : 20/06/2026
Disetujui : 28/06/2026

Keywords:

Accountability, Asset Management Policy, Financial Report Quality, Local Government

Kata Kunci :

Akuntabilitas, Kebijakan Pengelolaan Aset, Kualitas Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT:

This study aims to analyze the influence of asset management and accountability policies on the quality of financial reports of the Empat Lawang Regency Government. The research method used is a quantitative method using primary data obtained through questionnaires distributed to 53 Empat Lawang Regency Government employees involved in asset management and financial report preparation. Data analysis techniques include validity tests, reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing (t-test and F-test). The results show that asset management policies have a positive and significant effect on financial report quality, while accountability has a positive effect on financial report quality. Simultaneously, asset management and accountability policies have a significant effect on financial report quality with a coefficient of determination (R^2) of 0.778, indicating that 77.8% of the variation in financial report quality can be explained by these two variables, while the remaining 22.2% is influenced by other factors outside the study. The conclusion of this study is that the implementation of good asset management policies and increased accountability can improve the quality of financial reports of the Empat Lawang Regency Government.

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 53 pegawai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang terlibat dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan. Teknik analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, serta uji hipotesis (uji t dan uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Secara simultan, kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,778, yang menunjukkan bahwa 77,8% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan sisanya sebesar 22,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Simpulan penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan pengelolaan aset yang baik serta peningkatan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan, membantu dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan kinerja keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis diantaranya Laporan Neraca, Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan



Laporan Perubahan Ekuitas. Pada prinsipnya penyajian laporan keuangan harus berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat disajikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya, serta laporan keuangan yang disajikan harus material dan relevan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai bagaimana anggaran pemerintah daerah digunakan, termasuk realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan DPRD atas pengelolaan keuangan daerah.

LKPD merupakan rapor dari Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan anggaran. Organisasi pemerintah merupakan lembaga atau entitas yang dibentuk oleh Negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan publik. Organisasi ini memiliki berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian di tingkat Pusat, hingga Pemerintah daerah dan Pemerintahan Desa di tingkat Lokal. Organisasi Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Pemerintah daerah diposisikan sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, Pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat umum. Permasalahan yang sering muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah mengenai kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang maju dan berkembang apabila terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya tinggi. Namun pada kenyataannya di lapangan, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum dapat menghasilkan sebuah LKPD yang sesuai dengan baik untuk disajikan pada saat audit dari BPK.

Kebijakan Pengelolaan Aset merupakan suatu rangkaian peraturan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola aset suatu organisasi atau entitas. Tujuan kebijakan pengelolaan aset itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa aset digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan nilai aset itu sendiri. Kebijakan pengelolaan aset terdiri dari beberapa unsur diantaranya pengidentifikasian aset, pengklasifikasi aset, pengelolaan aset, pemeliharaan aset dan yang terakhir adalah pengawasan aset. Kebijakan Pengelolaan Aset tetap (barang milik Negara) yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance*, dan diharapkan akan mampu meningkatkan keterandalan dalam pengelolaan keuangan negara. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberikan pendapat, lebih sering disebabkan masalah kebijakan pengelolaan aset, dalam lembaga pemerintahan aset tetap merupakan komponen utama yang memberikan kontribusi terhadap kelancaran kegiatan pemerintah. Hal ini terbukti pada Kabupaten Empat Lawang dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan terkait Aset Daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada tahun 2024. Dengan banyaknya temuan terkait aset tersebut menandakan bahwa beberapa entitas daerah masih terjadi penyimpangan peraturan dalam bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah.

Kabupaten Empat lawang salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, guna mendukung pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah membentuk Badan Pengelola



Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai lembaga teknis yang mengelola keuangan dan aset daerah. Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan. Terlihat dengan adanya opini yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian untuk tujuh tahun berturut-turut yang sebelumnya dimana pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. walaupun opini yang diperoleh WTP, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk daerah, yaitu pengelolaan aset yang berupa tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat, Bangunan rehab yang pencatatannya masih terpisah dengan bangunan induk, kebijakan property investasi yang belum tertuang dalam kebijakan akuntansi. Hal ini menyebabkan aset negara tidak dipergunakan dengan baik dan seringkali digunakan tanpa hak oleh masyarakat yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti berapa besar pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini penulis menambah variabel baru untuk diteliti yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan terkait pengelolaan aset dan akuntabilitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Seperti bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang menginventarisasi aset yang mereka miliki. Dikarenakan, kegiatan inventarisasi aset juga merupakan salah satu indikator penting untuk menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Inventarisasi aset menjadi sangat penting karena dalam inventarisasi terdapat kegiatan pencatatan yang berguna untuk mengetahui jumlah barang atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Selain itu, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja pemerintahan yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya penerapan optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat, serta adanya sistem pengendalian yang terintegritas mengenai pengelolaan aset daerah.

KAJIAN TEORI

1Kebijakan Pengelolaan Aset

Menurut Luthfiani & M.Si.Ak, (2022) Kebijakan Pengelolaan Aset merupakan suatu kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola aset yang dimiliki oleh daerah tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset. Kebijakan tersebut merupakan pedoman atau arah tindakan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan tertentu, baik oleh pemerintah, organisasi, atau individu. Kebijakan berbeda dengan aturan dan hukum, dan seringkali bersifat lebih fleksibel. Kebijakan juga dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, berbeda dengan aturan yang harus diikuti secara kaku. Kebijakan juga dapat ditemukan diberbagai bidang, seperti pemerintahan, organisasi bisnis, Pendidikan, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Basri, (2021) Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan manajemen aset secara memadai. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,



pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Akuntabilitas

Menurut Darwanis & Chairunnisa, (2013) Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kontrak kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Menurut Sadjiarto, (2000) berdasarkan peraturan perundang-undangan, tiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, wajib memiliki laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya. Istilah akuntabilitas bisa didefinisikan dalam banyak perspektif dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Banyak peneliti mendefinisikan akuntabilitas sesuai dengan konteks dan kondisi masing-masing. Dalam sistem pemerintahan konstitusional, ada dua jenis akuntabilitas, yaitu: (1) akuntabilitas internal, yang merupakan sebuah tipe akuntabilitas langsung yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan, dan (2) akuntabilitas eksternal, yang merupakan tipe akuntabilitas tidak langsung yang melibatkan pelaporan kepada pihak luar organisasi Ahyaruddin & Akbar, (2017). Asiva Noor Rachmayani, (2015) menjelaskan ada beberapa indikator akuntabilitas dalam pengelolaan aset antara lain:

- 1) Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan aset
- 2) Budaya kerja lingkungan pemerintah
- 3) Adanya komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik
- 4) Pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang, adanya sanksi yang jelas bagi yang tidak melaksanakan tugas dengan baik, hasil audit di publikasikan
- 5) Menindaklanjuti hasil audit dengan cepat dan tepat
- 6) Secara berkala melaporkan kinerjanya kepada DPRD dan masyarakat
- 7) Adanya mekanisme dan informasi mengenai keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memberikan masukan.



Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Asiva Noor Rachmayani, (2015) Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Luthfiani & M.Si.Ak, (2022) juga menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki beberapa indikator, diantaranya:

- 1) Penyajian informasi yang relevan bagi pengambil keputusan
- 2) Akurasi dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan
- 3) Informasi keuangan yang mudah dipahami
- 4) Laporan keuangan dapat dibandingkan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menganalisis pengaruh kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 53 pegawai Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang terlibat dalam pengelolaan aset dan penyusunan laporan keuangan. Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin dan terlebih dahulu diuji validitas serta reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS melalui uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi (R^2), serta uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F dengan tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui pengaruh parsial maupun simultan variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Pernyataan	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Standar	Keterangan
Kebijakan Pengelolaan Aset	10	0,940	0,60	Reliable
Akuntabilitas	10	0,932	0,60	Reliable
Kualitas Laporan Keuangan	10	0,950	0,60	Reliable

Uji reliabilitas dikatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,60. Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa nilai cronbach's alpha > dari nilai batas. Maka tiap-tiap item diatas dikatakan reliabel.



Tabel 2.
Uji Normalitas
Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁) Akuntabilitas (X₂)
Kualitas Laporan Keuangan (Y)

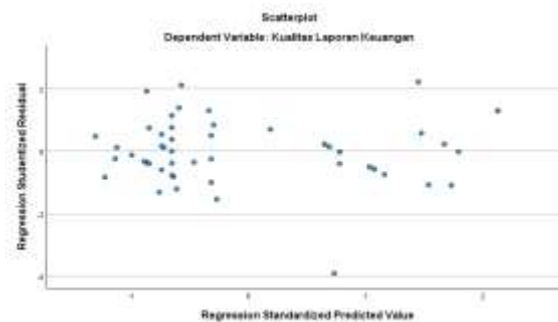
			Unstandardized Residual
N			53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		2.63369655
Most Extreme Differences	Absolute		.091
	Positive		.091
	Negative		-.072
Test Statistic			.091
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.319
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.307
		Upper Bound	.331

Tabel diatas mempertegas bahwa model regresi yang diperoleh berdistribusi normal, dimana pada uji statistik One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test dapat dilihat probabilitas signifikan terhadap variabel. Nilai probabilitas sebesar $0,319 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolineritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.289	2.304		4.466	<,001		
	Kebijakan Pengelolaan Aset	.628	.165	.746	3.798	<,001	.115	8.676
	Akuntabilitas	.100	.137	.143	.726	.471	.115	8.676

Berdasarkan analisis data pada Tabel diatas, nilai toleransi untuk setiap variabel bebas teramati lebih besar dari 0.10 (toleransi Kebijakan Pengelolaan Aset = 0.115; toleransi Akuntabilitas = 0.115). Lebih lanjut, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel bebas penelitian tercatat kurang dari 10 (VIF variabel Kebijakan Pengelolaan Aset = 8.676; VIF variabel Akuntabilitas= 8.676). Dengan mempertimbangkan nilai toleransi dan VIF yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolineritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan *scatterplot* pada gambar diatas yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas, terlihat bahwa titik-titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola yang sistematis. Penyebaran titik-titik ini terjadi secara merata di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Observasi ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi. Dengan demikian, model regresi ini dianggap layak untuk memprediksi variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Analisis Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.289	2.304		4.466	<,001
	Kebijakan Pengelolaan Aset	.628	.165	.746	3.798	<,001
	Akuntabilitas	.100	.137	.143	.726	.471

Dari perhitungan di atas dengan menggunakan program SPSS, Maka daya persamaan adalah sebagai berikut: $Y = 10.289 + 0.628X_1 + 0.100 X_2 + e_i$

1. Nilai konstanta sebesar 10.289 mempunyai arti bahwa apabila Kebijakan Pengelolaan Aset (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) sama dengan nol maka Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang akan tetap sebesar 10.289 hal ini hanya berlaku saat dilakukan penelitian.
2. Koefisien Regresi variabel Kebijakan Pengelolaan Aset (X_1) sebesar 0.628 mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Kebijakan Pengelolaan Aset, maka akan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,628 dengan menganggap variabel lain adalah tetap.
3. Koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X_2) sebesar 0.100 mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang apabila tanggapan terhadap Akuntabilitas naik sebesar satu satuan maka variabel Akuntabilitas (X_2), akan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,100 dengan menganggap variabel lain adalah tetap.



Tabel 5.
Nilai Koefisien Determinasi R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.882 ^a	.778	.769	2.686

Berdasarkan tabel diatas memperoleh angka R² (R square) sebesar 0,778 nilai ini berarti bahwa variabel Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁), dan Akuntabilitas (X₂) mempunyai pengaruh sebesar 77,8% dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Tabel 6.
Uji t (Uji Secara Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.289	2.304		4.466	<,001
	Kebijakan Pengelolaan Aset	.628	.165	.746	3.798	<,001
	Akuntabilitas	.100	.137	.143	.726	.471

Melalui hasil perhitungan yang dilakukan, maka perbandingan antara t_{hit} dengan $t_{a/2}$ ($n-k-1$) = $53-3-1 = 49$ (2.010) setiap variable sebagai berikut 1). Kebijakan Pengelolaan Aset yaitu $t_{hit} > t_a$ ($4.466 > 2.010$ dan nilai $sig < a = 0,01 < 0,05$ hal tersebut menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan variabel Kebijakan Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. 2). Akuntabilitas yaitu $t_{hit} > t_a$ ($3.798 > 2.010$) dan nilai $sig > a = 0,471 > 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut bahwa variabel Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang.3). Dari hasil penelitian variabel yang dominan adalah (4.466) pada variabel Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁).

Tabel 7.
Uji F (Kelayakan Model)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1260.592	2	630.296	87.374	<,001 ^b
	Residual	360.691	50	7.214		
	Total	1621.283	52			

Melalui perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS diperoleh perbandingan antara $f_{hitung} > f_{tabel} = 87.374 > 3.18$, maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh yang positif antara variabel Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁) dan Akuntabilitas (X₂) Kualitas Laporan Keuangan (Y).

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data primer yang diperoleh dari 53 responden pegawai pemerintah Kabupaten Empat Lawang, diketahui bahwa Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁), dan Akuntabilitas (X₂) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan



Keuangan (Y). Data diperoleh melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga hasil analisis dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Hasil tanggapan responden menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengelolaan Aset berada dalam kategori baik, hal ini terlihat dengan adanya pedoman atau SOP yang spesifik dan mudah dipahami untuk setiap tahapan pengelolaan aset yang tercermin pada Kulaitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan variabel Akuntabilitas juga dikategorikan baik, ditandai dengan Pemerintah daerah secara berkala melaporkan kinerja keuangannya kepada DPRD dan masyarakat. Dengan demikian, baik Kebijakan Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas memberikan kontribusi positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset (X₁) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Kebijakan Pengelolaan Aset* (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* (Y) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pengaruh ini ditunjukkan melalui analisis terhadap 10 pernyataan dalam kuesioner yang merepresentasikan variabel *kebijakan pengelolaan aset*, di mana mayoritas responden memberikan tanggapan positif. Pernyataan-pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana Kebijakan Pengelolaan Aset pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan dari hasil audit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Menurut Ningsih, (2023) Hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa manajemen aset tetap memiliki dampak positif sebesar 51,9% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kualitas laporan keuangan memiliki dampak positif sebesar 64,5% terhadap keakuratan informasi keuangan. Menurut penelitian Dewi et al., (2023) Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Talaud. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa perencanaan, penilaian, penatausahaan, serta pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 36,5%, sisanya 63,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pengaruh Akuntabilitas (X₂) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Akuntabilitas* (X₂) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Kualitas Laporan Keuangan* (Y) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Hal ini dapat dilihat dari jawaban sebanyak 10 pernyataan yang mewakili variabel *Akuntabilitas* yang menggambarkan baik atau buruknya Akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, pertanyaan-pertanyaan tersebut mencerminkan bagaimana Akuntabilitas pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik dan dari hasil audit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Dari 10 pertanyaan masih terdapat 3 jawaban responden dengan pilihan jawaban cukup baik, pernyataan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Empat Lawang belum menetapkan sanksi atau konsekuensi yang jelas bagi pejabat yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan belum adanya mekanisme bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menurut Sadjiarto, (2000) Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang



diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Bahwa kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang. Secara parsial, kebijakan pengelolaan aset terbukti berpengaruh positif dan signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, sedangkan akuntabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan meskipun belum signifikan secara statistik. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,778 menunjukkan bahwa 77,8% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, sedangkan 22,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dengan demikian, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dicapai melalui penerapan kebijakan pengelolaan aset yang lebih optimal, didukung oleh penguatan akuntabilitas, khususnya dalam penegakan sanksi, tindak lanjut hasil audit, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2017). Akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah: semu atau nyata? *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2), 105–117. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art3>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang. Program Studi Keuangan Publik, Asdaf Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Basri, H. (2021). Kajian Hukum Terhadap Pengelolaan Aset Daerah. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 86–105. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869>
- Darwanis, & Chairunnisa, S. (2013). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 6(2), 150–174.
- Dewi, W. K., Erniwati, E., & Novia Putri, C. (2023). Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Point Equilibrium Manajemen dan Akuntansi*, 5(1), 19–27. <https://doi.org/10.59963/jpema.v5i1.130>
- Luthfiani, A., & D. S. (2022). Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 115–122. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3326>
- Ningsih, W. Y. (2023). Pengaruh Penatausahaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Kewajaran Informasi Keuangan. *Journal of Economics, Finance, and Social Science Review*, 1(1), 38–46. <http://repository.upi.edu/id/eprint/91752>
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 138–150. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/aku/article/view/15674>